

## Mobilisasi Sumberdaya dalam Program Percepatan dan Penurunan *Stunting* di Wonosobo

**Ahmad Baihaqi Midhol**

Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia

Corresponding Author:

Ahmad Baihaqi Midhol, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, Indonesia

Email: [ahmad.midhol@mhs.unsoed.ac.id](mailto:ahmad.midhol@mhs.unsoed.ac.id)

### Abstract

Wonosobo Regency is one of the areas with high stunting rates in Indonesia, with a prevalence reaching 20.22% in 2021. Based on the health service's work plan for accelerating and reducing stunting, it is carried out through several activities, including: Provision of Iron Tablets, Pregnancy Check-ups and Screening, Provision of Additional Food for Pregnant Women, Toddlers and Toddlers, Strengthening Exclusive Breastfeeding. However, although various efforts to accelerate stunting reduction have been carried out by the Wonosobo regional government, the success of this program is highly dependent on effective resource mobilization. This study will analyze how resource mobilization is carried out in the stunting reduction acceleration program in Wonosobo. The results of this study indicate that there are three main categories that are the focus of mobilization. First, government resource mobilization. Second, non-government resource mobilization. Third, academic participation.

**Keywords:** Regional Policy, Resource Mobilization, Stunting

### Abstrak

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah dengan angka *stunting* yang tinggi di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 20,22% pada tahun 2021. Berdasarkan rencana kerja dinas kesehatan dalam percepatan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya: Pemberian Tablet Tambahan darah, Pemeriksaan Kehamilan dan Skrining, Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil, Baduta dan Balita, Penguantan Asi Eksklusif. Namun, meskipun berbagai upaya percepatan penurunan *stunting* telah dilakukan oleh pemerintah daerah Wonosobo, keberhasilan program ini sangat bergantung pada mobilisasi sumber daya yang efektif. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mobilisasi sumber daya dilakukan dalam program percepatan penurunan *stunting* di Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori utama yang menjadi fokus dalam mobilisasi. *Pertama*, mobilisasi sumber daya kepemerintahan. *Kedua*, mobilisasi sumber daya non-pemerintah. *Ketiga*, partisipasi akademik.

**Kata kunci:** Kebijakan Daerah, Mobilisasi Sumberdaya, *Stunting*

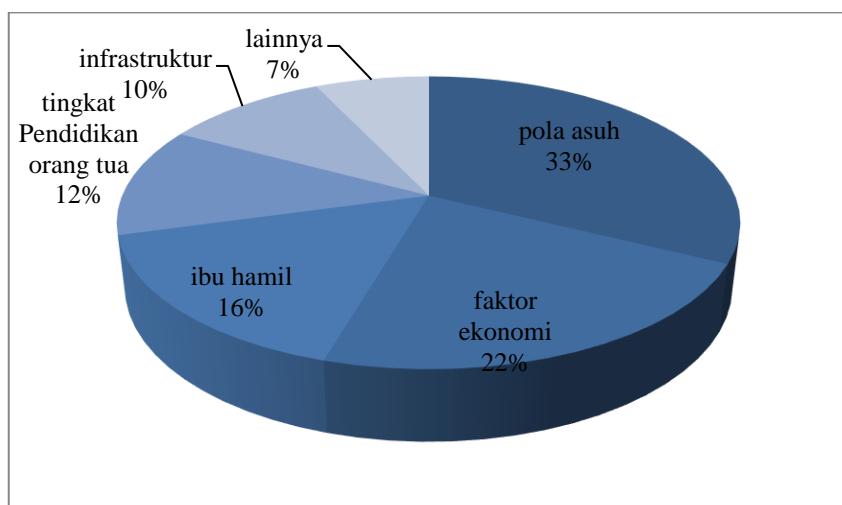
### PENDAHULUAN

*Stunting* di Indonesia menjadi salah satu isu prioritas pemerintah untuk diatasi sesegera mungkin. *Stunting* merupakan kondisi dimana anak balita mengalami gagal tumbuh yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis (Wiliyanarti, *et.al*, 2023). Kondisi kekurangan gizi kronis tersebut bisa terjadi sejak dalam kandungan, akan tetapi baru dapat terlihat setelah bayi berusia dua tahun. *Stunting* bisa dicirikan dengan kondisi balita dengan panjang atau tinggi

badan lebih kecil (kerdil) jika dibanding dengan balita seumurannya. Menurut pusdatin Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa *stunting* dapat terjadi diantaranya karena beberapa faktor yaitu: kondisi ekonomi orang tua, kondisi gizi ibu saat hamil, kondisi lingkungan dan kekurangan asupan nutrisi pada bayi. Kondisi tersebut berdampak pada kesehatan balita yang kemudian memberikan resiko dalam tumbuh kembang anak di kemudian hari (Wiliyanarti, *at.al*, 2023).

WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga dengan kasus *stunting* tertinggi di Asia (Khansa, 2024). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, angka *stunting* di Indonesia mencapai 30,8%, angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan WHO yang menetapkan bahwa prevalensi *stunting* seharusnya tidak lebih dari 20% (Sugianto, 2021). Melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya penanganan *stunting*, yang di antaranya diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Target pemerintah adalah menurunkan prevalensi balita yang mengalami *stunting* di bawah 14% pada tahun 2024 (Rahmadani, S. and Lubis, 2023).

Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah dengan angka *stunting* yang tinggi di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 20,22% pada tahun 2021 (DHOWI, 2023). Tingginya angka *stunting* di Wonosobo membuat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) menetapkan wilayah ini sebagai lokasi prioritas dalam penanganan *stunting* nasional. Berbagai penyebab *stunting* di Wonosobo telah diidentifikasi, hasil kajian BAPPEDA Kabupaten Wonosobo dikutip dari penelitian Sulistiyani dkk (2023) menunjukkan bahwa 32% disebabkan oleh pola asuh orang tua yang buruk, 22% dari faktor ekonomi, 16% terkait dengan kondisi kesehatan saat ibu hamil, 12% dari pendidikan orang tua, khususnya ibu, 10% dari infrastruktur, dan 7% dari faktor-faktor lainnya.



**Gambar 1.** Penyebab *Stunting* di Kabupaten Wonosobo

Sumber: (Sulistiyani, A. T., Hijriyah, A. P., Hamiidah, N. S., Hendaliani, N. C., & Zulfa, 2023)

Berdasarkan hasil riset BAPPEDA Wonosobo diatas penyebab terbesar *stunting* di di Wonosobo dikarenakan oleh pola asuh orang tua dimana memiliki persentase mencapai 33%. Dari tingginya kasus *stunting* di Wonosobo, pemerintah daerah melakukan beberapa upaya dalam percepatan penurunan kasus *stunting* (DHOWI, 2023). Berdasarkan rencana kerja dinas

kesehatan dalam percepatan dan penurunan *stunting* dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya: Pemberian Tablet Tambahan darah, Pemeriksaan Kehamilan dan Skrining, Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil, Baduta dan Balita, Penguanan Asi Eksklusif (Hamdani, *et.al*, 2024). Namun, meskipun berbagai upaya percepatan penurunan *stunting* telah dilakukan oleh pemerintah daerah Wonosobo, keberhasilan program ini sangat bergantung pada mobilisasi sumber daya yang efektif. Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kesehatan, anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam merubah pola asuh dan perilaku kesehatan keluarga. Tanpa mobilisasi sumber daya yang optimal, program-program yang telah dirancang bisa menghadapi hambatan dalam implementasi di lapangan (Manulu, 2016). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana mobilisasi sumber daya dilakukan dalam program percepatan penurunan *stunting* di Wonosobo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2004) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis mobilisasi sumber daya dalam program percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonosobo dengan menggambarkan bagaimana sumber daya manusia, finansial dan kelembagaan dimanfaatkan secara optimal. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk dokumen resmi, laporan pemerintah serta literatur akademik yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses tersebut diperkuat melalui triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas dalam temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis terkait mobilisasi sumber daya dalam program percepatan dan penurunan *stunting* di Wonosobo dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, mobilisasi sumber daya kepemerintahan, yang mencakup peran tenaga kesehatan, termasuk ahli gizi, bidan desa, dan kader posyandu, dalam memberikan layanan kesehatan dan pendidikan gizi kepada masyarakat. Kedua, mobilisasi non-pemerintah, yang melibatkan partisipasi sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan dalam mendukung upaya penurunan *stunting* melalui program-program CSR, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat. Ketiga, mobilisasi sumber daya anggaran, yang mencakup alokasi dana dari pemerintah daerah, APBN, dan sumber lain untuk mendanai berbagai inisiatif dan program yang ditujukan untuk menurunkan angka *stunting*. Adapun uraiannya sebagai berikut:

### **Mobilisasi sumberdaya tenaga Kepemerintahan (Tenaga kesehatan)**

#### **1. Petugas Ahli Gizi Puskesmas**

Mobilisasi sumber daya tenaga ahli gizi di puskesmas merupakan salah satu faktor kunci dalam upaya percepatan penurunan kasus *stunting* di Kabupaten Wonosobo (DHOWI, 2023). Setiap puskesmas di Wonosobo memiliki setidaknya satu ahli gizi yang bertanggung jawab untuk beberapa desa dalam cakupan wilayahnya. Ahli gizi berperan penting dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kader posyandu dalam pembuatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang kemudian disalurkan kepada balita dan ibu hamil dengan risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) (Sari, R. *et.al*, 2022) . Program ini

bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi yang tepat dan mengatasi masalah malnutrisi yang menjadi penyebab utama *stunting*.

Dari perspektif Standar Pelayanan Minimal (SPM), puskesmas di Kabupaten Wonosobo telah memenuhi ketentuan, yaitu adanya seorang ahli gizi di setiap puskesmas yang berfungsi mengelola program-program gizi. Untuk mendukung efektivitas mobilisasi tenaga ahli gizi ini, puskesmas juga telah membentuk kader gizi di tingkat desa (Khansa, 2024). Kader-kader ini membantu ahli gizi dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan, evaluasi status gizi balita, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang. Dengan demikian, keberadaan kader gizi berfungsi sebagai perpanjangan tangan ahli gizi di masyarakat, sehingga intervensi gizi dapat berjalan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Dalam konteks mobilisasi sumber daya, kolaborasi antara ahli gizi puskesmas dan kader di desa menjadi esensial dalam mendukung keberhasilan program-program diantaranya pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, dan penguatan ASI eksklusif (Wiliyanarti, *et.al*, 2023). Mobilisasi tersebut memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan *stunting* mampu menjangkau populasi target secara optimal, khususnya di wilayah pedesaan yang rawan *stunting* misalnya di daerah Tieng Kecamatan Kejajar. Integrasi ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *stunting* melalui intervensi gizi yang lebih terfokus dan berbasis pada kondisi lokal masyarakat Wonosobo.

## 2. Bidan Desa

Mobilisasi sumber daya dalam percepatan penurunan kasus *stunting* di Kabupaten Wonosobo juga terlihat melalui peran vital bidan desa yang tersebar di seluruh wilayah desa. Bidan desa memainkan peran sentral dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang menjadi kelompok rentan dalam upaya pencegahan *stunting* (Sumiaty, & Nurbaya, 2023). Selain bertugas di Pos Kesehatan Desa (PKD), bidan desa juga seringkali memiliki tanggung jawab di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, yang memperluas cakupan layanan kesehatan mereka.

Bidan desa berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, memberikan pendampingan persalinan, serta memastikan bahwa ibu-ibu hamil mendapatkan asupan nutrisi yang cukup melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan tablet tambah darah. Selain itu, mereka juga turut memantau perkembangan bayi baru lahir dan balita melalui program posyandu, di mana status gizi anak dipantau secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal *stunting* (Sumiaty, & Nurbaya, 2023).

Sebagai bagian dari mobilisasi sumber daya, bidan desa bekerja sama erat dengan kader kesehatan desa serta petugas gizi di puskesmas. Bidan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Asi eksklusif dan pola asuh yang baik, yang menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan *stunting*. Melalui peran mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat desa, bidan desa menjadi ujung tombak dalam mendukung program-program pemerintah terkait percepatan penurunan *stunting* di Wonosobo (DHOWI, 2023).

Kehadiran bidan desa yang tersebar di berbagai pelosok desa menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Dengan demikian,

mobilisasi bidan desa ini merupakan bagian integral dari intervensi kesehatan yang difokuskan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonosobo.

### 3. Kader Posyandu

Selain tenaga ahli gizi dan bidan, kader posyandu juga memainkan peran kunci dalam percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonosobo. Di tingkat desa, kader posyandu dimobilisasi secara aktif untuk membantu pelaksanaan berbagai program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan *stunting* (Has, 2021). Kader posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan di desa, yang berperan dalam pemberian layanan dasar, seperti penimbangan balita dan ibu hamil, serta pencatatan dan pelaporan data kesehatan yang diperoleh dari hasil penimbangan. Data ini sangat penting untuk memantau status gizi masyarakat desa secara berkala (Sari, Ibnu, & Ramadhani, 2022).

Program intervensi 90 hari pemberian makanan tambahan (PMT), kader posyandu menjadi petugas utama yang bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mendistribusikan menu makanan bergizi kepada balita, baduta *stunting*, ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK), serta ibu menyusui (Has, 2021). Mereka juga dilatih untuk memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya asupan gizi seimbang dan pola asuh yang baik untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal. Melalui kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan, kader berperan aktif dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat serta mendukung ibu-ibu di desa dalam memahami pentingnya ASI eksklusif, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan anak secara berkala.

Selain tugas pelayanan langsung, kader posyandu juga dilibatkan dalam tugas administratif, seperti pengumpulan data dari hasil penimbangan, yang kemudian dilaporkan kepada puskesmas untuk dianalisis lebih lanjut. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang tepat untuk menurunkan prevalensi *stunting* di wilayah tersebut (Has, 2021). Mobilisasi kader posyandu ini sangat efektif karena mereka merupakan bagian dari komunitas lokal, sehingga dapat lebih mudah menjangkau masyarakat dan memberikan intervensi secara tepat sasaran (Sumiyati, & Nurbaya, 2023). Keberadaan kader posyandu yang tersebar di setiap desa di Wonosobo menjadi komponen penting dalam memastikan program-program pemerintah untuk penurunan *stunting* dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai kelompok yang paling membutuhkan.

### Mobilisasi Non Pemerintah

Upaya Kabupaten Wonosobo dalam percepatan dan penurunan kasus *stunting* juga melibatkan mobilisasi sektor-sektor di luar pemerintahan, seperti pihak swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta perguruan tinggi. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memperluas dampak program penurunan *stunting* dan memastikan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian untuk mendukung program-program yang telah direncanakan. Adapun bentuk mobilisasi di antaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Perusahaan Geodipa Energy

Dukungan dari Geodipa Energy dalam program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu bentuk kontribusi sektor swasta yang sangat signifikan. Geodipa Energy memberikan bantuan dalam bentuk pemberian makanan bergizi selama 90 hari untuk balita dan ibu hamil dengan risiko kekurangan energi kronis (KEK). Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,-, yang dialokasikan khusus untuk Desa Tambi dan Desa Kejajar di Wonosobo (Hamidi, 2022).

## 2. Bank Jateng

Sebagai salah satu lembaga keuangan di Jawa Tengah, Bank Jateng turut memberikan dukungan dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2023, Bank Jateng berkontribusi melalui bantuan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 198.000.000,-, yang ditujukan untuk membantu mempercepat penurunan *stunting* di tiga desa: Desa Candimulyo dan Desa Kapencar di Kecamatan Kretek, serta Desa Tieng di Kecamatan Kejajar. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan intervensi gizi, seperti program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan layanan gizi di desa-desa tersebut. Bantuan ini juga digunakan untuk mendukung pelatihan kader posyandu, guna memperkuat peran mereka dalam pemantauan status gizi balita dan ibu hamil di desa-desa tersebut (BankJateng, 2023).

## 3. RS PKU Muhammadiyah Wonosobo

RS PKU Muhammadiyah Wonosobo turut ambil bagian dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* melalui penggerahan tenaga kesehatan dan penyediaan layanan konsultasi kesehatan secara khusus di Kabupaten Wonosobo. Dukungan ini sangat penting mengingat RS PKU Muhammadiyah merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki kapasitas dan sumber daya kesehatan yang kompeten. Tenaga kesehatan yang dikerahkan oleh RS PKU Muhammadiyah mencakup dokter spesialis gizi, bidan, dan perawat, yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat di berbagai desa yang memiliki angka *stunting* tinggi. Mereka memberikan konsultasi kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita *stunting*, serta melakukan skrining kesehatan dan gizi secara berkala untuk memastikan penanganan yang tepat (Irfiani, 2023).

## 4. Perusahaan Danone

Danone turut serta dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonosobo dengan memberikan pendampingan masyarakat, edukasi, serta pelatihan kader. Pada tahun 2023, program Danone ini diterapkan di Desa Tlogojati, Kecamatan Wonosobo, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik dalam pencegahan *stunting*. Dalam program ini, Danone bekerja sama dengan tenaga ahli gizi dan kader posyandu setempat untuk memberikan pelatihan kepada kader kesehatan desa (Irfiani, 2023).

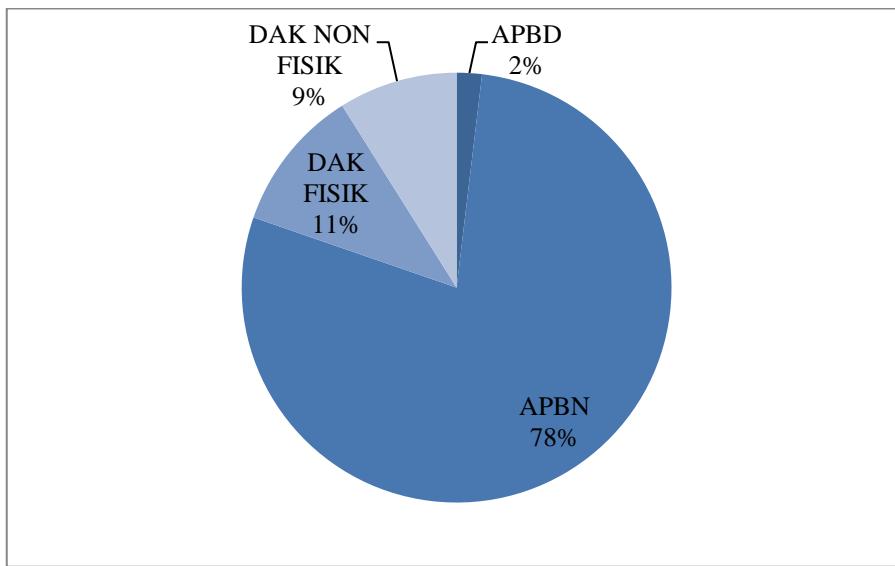
## 5. Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)

UNSIQ turut berperan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonosobo melalui program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang berfokus pada penanganan *stunting*. Program KPM ini tersebar di sebagian besar desa di Wonosobo, dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu mendampingi masyarakat dalam penerapan program-program kesehatan dan gizi. UNSIQ juga aktif mendorong tenaga pendidik dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berfokus pada permasalahan *stunting* di Kabupaten Wonosobo. Melalui penelitian ini, UNSIQ berusaha untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai penyebab dan solusi *stunting*, yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebijakan lokal dan program intervensi yang lebih efektif(Irfiani, 2023).

## **Mobilisasi Sumberdaya Anggaran**

Percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Wonosobo tidak mungkin terlepas dari dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Mobilisasi anggaran menjadi salah satu

langkah kunci dalam memastikan bahwa program-program intervensi yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka *stunting* (Permanasari, 2020). Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo menunjukkan komitmen tinggi dalam upaya ini dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk tahun 2023. Pada tahun 2023, Kabupaten Wonosobo mengalokasikan dana sebesar Rp. 144.207.968.700,- untuk program percepatan penurunan *stunting*. Anggaran tersebut bersumber dari berbagai sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Irfiani, 2023). Rincian alokasi dana tersebut adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.** Persentase Anggaran *Stunting* Kabupaten Wonosobo

*Sumber: (Irfiani, 2023)*

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran terbesar dalam penanganan *stunting* di Wonosobo bersumber dari APBN sebesar 78%. Anggaran tersebut digunakan untuk dukungan dalam kegiatan atau program-program nasional yang nantinya diimplementasikan secara lokal. Diantaranya digunakan untuk pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, kemudian pemeriksaan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita serta program-program nasional lainnya. kemudian terdapat alokasi anggaran sebesar 2% dari APBD yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lokal. Diantaranya pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), peningkatan infrastruktur penunjang, kemudian pelatihan tenaga kesehatan dan program daerah lainnya. Kemudian terdapat anggaran yang bersumber dari DAK dimana digunakan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan di Kabupaten Wonosobo.

Dengan adanya mobilisasi anggaran tersebut pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya memastikan setiap aspek dalam program percepatan dan penurunan *stunting* mendapatkan dukungan finansial yang cukup. Adanya dukungan finansial tersebut juga digunakan untuk mendorong adanya koordinasi pada lintas sektor yang ada, baik pemerintah, lembaga swasta dan akademisi dalam memastikan adanya keterpaduan terkait program-program yang dijalankan.

## KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan mobilisasi sumber daya yang signifikan dalam upaya percepatan dan penurunan *stunting*. Terdapat tiga kategori utama yang menjadi fokus dalam mobilisasi ini. Pertama, mobilisasi sumber daya kepemerintahan yang melibatkan peran aktif tenaga kesehatan, seperti ahli gizi, bidan, dan kader posyandu, dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Keberadaan tenaga kesehatan ini sangat penting dalam memberikan edukasi gizi, melakukan pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta menyusun intervensi yang tepat bagi mereka yang berisiko mengalami *stunting*. Kedua, mobilisasi sumber daya non-pemerintah juga berperan krusial dalam mendukung program penurunan *stunting*. Kolaborasi dengan sektor swasta, seperti Geodipa Energi dan RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, serta perusahaan seperti Danone, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk bantuan makanan bergizi, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat. Pihak BUMD seperti Bank Jateng turut serta dalam memberikan dukungan finansial yang diperlukan untuk melaksanakan program-program ini.

Ketiga, partisipasi dari institusi akademik seperti Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) dalam melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan penelitian mengenai *stunting* menunjukkan komitmen bersama dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak ini menciptakan sinergi yang kuat dan menunjukkan bahwa penanganan masalah *stunting* memerlukan kolaborasi multi-sektor yang efektif. Dengan demikian, mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak hanya mencakup dukungan dari sektor publik, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan akademik. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka *stunting* dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

## REFERENSI

- BankJateng. (2023, February). Bank Jateng Dukung Penanganan Stunting lewat Bantuan Beras Fortifikasi. *Bankjateng.Co.Id*.
- Dhowi, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Wonosobo. *Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hamdani, D., Ilmiah, N., Rahmah, A., Handayani, I., & Khasanah, N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Stunting. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(1), 66–72.
- Hamidi, M. (2022, June). PT GeoDipa Launching Program Penanganan Stunting di Banjarnegara dan Wonosobo. *Timesindonesia.Co.Id*.
- Has, D. F. S. (2021). Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Program Pencegahan Stunting Pada Balita Di Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, 1(02), 7–14.
- Irfiani, E. M. (2023). *Potret Situasi Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Serta Stunting Di Wonosobo (Studi Kasus Di Desa Lengkong, Candiyasan Dan Tlogojati) Kita Institute Wonosobo Tahun 2023*. Kita Institute.
- Khansa, K. R. S. (2024). Faktor-faktor yang Menyebabkan Stunting pada Balita: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Medika Hutama*, 5(02), 3854–3867.
- Manulu, D. (2016). Gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*,

- Permanasari. (2020). Permanasari, Yurista, Meda Permana, Joko Pambudi, Bunga Christitha Rosha, Made Dewi Susilawati, Ekowati Rahajeng, Agus Triwinarto, and Rachmalina S. Prasodjo. "Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas." *Me. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4).
- Rahmadani, S. and Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(01), 188–194.
- Sari, R. E., Ibnu, I. N., & Ramadhani, A. (2022). Implementasi Pemantauan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Dalam Upaya Percepatan Perbaikan 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(16), 80–88.
- Sugianto, M. A. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia: Dengan Pendekatan What Is The Problem Represented To Be? *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(3), 197–209.
- Sulistiyani, A. T., Hijriyah, A. P., Hamiidah, N. S., Hendaliani, N. C., & Zulfa, M. T. (2023). Pendampingan Remaja Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini melalui Komunitas PIK Remaja di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna*, 1(01), 1–10.
- Sumiaty, S., S. Gz M. Nurbaya, and S. K. M. K. R. (2023). *Konvergensi Program Stunting (Peran Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Ibu Dan Perguruan Tinggi)*. Edugizi Pratama Indonesia.
- Wiliyanarti, Pipit Festi, Yuanita Wulandari, and M. G. (2023). *STUNTING "Pencegahan dan Penanganannya dengan Pendekatan Keluarga*. UMSurabaya Publishing.